

**STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN)
DI KOTA PADANG
(Studi Kasus di Kelurahan Purus dan Gunung Sarik)**

A R T I K E L

Oleh :

ILMAN SAHPUTRA

0821202052



**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
2013**

STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI KOTA PADANG

(Studi Kasus di Kelurahan Purus dan Gunung Sarik)

Ilman Sahputra

Program Pascasarjana Universitas Andalas

ABSTRAK

Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah pada Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama setahun dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di titik distribusi.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Program Raskin di Kota Padang, serta mengidentifikasi permasalahan pendataan rumah tangga miskin sasaran program Raskin di Kota Padang.

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di Kelurahan Purus dan Gunung Sarik. Pengumpulan data primer dan sekunder diperoleh dari hasil wawancara informan, angket dan literatur. Keabsahan data ditentukan dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi program Raskin belum terlaksana dengan optimal sesuai Pedum Raskin 2011, keberhasilan implementasi program Raskin sangat dipengaruhi oleh keakuratan pendataan RTS, masih lemahnya daya dukung implementor dalam pelaksanaan program, minimnya pagu anggaran, kurangnya sosialisasi, pengawasan dan evaluasi program.

Kata kunci : Ketahanan pangan, implementasi kebijakan, Program Raskin.

PENDAHULUAN

Ketahanan Pangan berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2002 merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengamanatkan bahwa pemerintah bersama masyarakat mewujudkan ketahanan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sasaran yang hendak dicapai pemerintah adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin.

Kemiskinan menurut BPS merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal kehidupannya. BPS menggunakan 14 variabel dalam pendataan sosial ekonomi penduduk untuk menentukan kategori rumah tangga miskin. Ke 14 variabel tersebut adalah luas bangunan, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi membeli daging, ayam dan susu selama seminggu, frekuensi makan sehari-hari, jumlah stel pakaian baru yang dibeli dalam setahun, akses ke puskesmas/poliklinik, lapangan pekerjaan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, serta kepemilikan beberapa aset.

Pasca krisis ekonomi tahun 1997, untuk mengimplementasikan suatu kebijakan yang memihak kaum miskin (*pro-poor policy*), pada tahun 1998 pemerintah meluncurkan Operasi Pasar Khusus (program OPK). Kemudian pada tahun 2002 program OPK berubah menjadi program Beras untuk Keluarga Miskin, disingkat program Raskin. Melalui program ini pemerintah menyalurkan

sejumlah beras yang dijual dengan harga murah kepada para RTM (Rumah Tangga Miskin) secara berkala (bulanan) agar mereka dapat mempertahankan tingkat konsumsi energinya. Program Raskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah pada RTS dengan alokasi 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp.1.600,-/kg di Titik Distribusi.

Dalam pelaksanaannya program Raskin banyak mengalami masalah dan penyimpangan, misalnya tidak tepat sasaran, jumlah beras yang tidak cukup, kualitas beras tidak layak, distribusi tidak tepat waktu, administrasi dan kinerja implementor yang belum baik dan menyimpang dan lain sebagainya. Dengan melihat banyaknya permasalahan dalam penyaluran raskin ini maka dinilai perlu untuk mengadakan penelitian mengenai studi implementasi Program Raskin dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Tujuan Penelitian ini adalah mendeskripsikan implementasi Program

Raskin di Kota Padang, serta mengidentifikasi permasalahan pendataan Rumah Tangga Miskin (RTM) sasaran program Raskin di Kota Padang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, dengan pendekatan studi kasus. Lokasi dan sampel penelitian ditetapkan secara purposif di dua kelurahan, yaitu Kelurahan Purus dan Gunung Sarik yang memiliki karakteristik dan tipologi berbeda. Pengumpulan data primer dan sekunder diperoleh dari hasil wawancara informan, angket dan literatur. Validitas data ditentukan dengan teknik triangulasi. Waktu penelitian berlangsung sejak bulan Mei-Juni 2012.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Penerima Raskin

Sampel dalam dalam penelitian ini berjumlah 42 orang, yang mewakili masing-masing RTS penerima Raskin, terdiri dari 16 orang di Kelurahan Purus dan 26 orang di Kelurahan Gunung Sarik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik penerima Raskin di Kota Padang 83% berjenis kelamin laki-

laki, 33% usia 35-43 tahun, mayoritas (48%) berpendidikan tamat SMP, umumnya berprofesi sebagai petani (29%) dan pedagang (24%). Mayoritas (62%) pendapatan penerima Raskin adalah Rp.600 ribu s.d 1 juta per bulan, demikian pula pengeluarannya. Umumnya 50% penerima Raskin memiliki anggota keluarga 1-3 orang.

2. Implementasi Program Raskin

Implementasi Program Raskin di Kota Padang pada penelitian ini dideskripsikan berdasarkan observasi dan wawancara peneliti pelaksanaan distribusi Raskin periode 2011 di lokasi penelitian, yaitu kelurahan Purus dan Kelurahan Gunung Sarik, yang dijelaskan berdasarkan tahapan pelaksanaannya.

a. Tahap Perencanaan

Pelaksanaan Program Raskin pada tahap perencanaan antara lain melakukan kegiatan sosialisasi, pendataan RTM sasaran, musyawarah desa (mudes) dan penetapan calon penerima Raskin.

Berdasarkan hasil kuesioner penelitian, dari total 42 orang sampel penerima Raskin di kedua kelurahan hanya

ada 1 orang (2%) yang menyatakan bahwa sosialisasi Raskin sudah dilaksanakan di kelurahan mereka. Berdasarkan pengamatan peneliti memang sosialisasi Raskin tidak dilaksanakan dengan baik. Banyak warga mengetahui informasi Raskin setelah diberikan kupon sebagai penerima Raskin. Mestinya masyarakat mengetahui informasi program Raskin sejak sebelum program dilaksanakan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan dengan berbagai media dan kesempatan, misalnya pada acara musyawarah desa, pertemuan kelurahan, acara sosial keagamaan dan sebagainya.

Terdapat 14 (33%) sampel yang mengakui bahwa calon penerima raskin diumumkan oleh pihak kelurahan. Berdasarkan pengamatan peneliti pengumuman calon penerima Raskin di kedua kelurahan tidak secara luas dilakukan. Daftar penerima hanya di tempelkan di kantor kelurahan, informasi selebihnya disampaikan melalui ketua RT masing-masing kepada penerima.

Sementara tidak ada satupun (0%) dari total sampel yang menyatakan tentang adanya pendataan petugas terhadap RTM calon penerima Raskin, pelaksanaan

musyawarah desa (mudes) dan keikutsertaan penerima Raskin dalam mudes di kelurahan mereka.

b. Tahap Pelaksanaan

Implementasi program Raskin pada tahap ini meliputi kegiatan pemberian kartu (kupon) pada penerima Raskin, penentuan tempat dan waktu distribusi dan persiapan kelengkapan administrasi distribusi, yang dikoordinasikan dengan RW/RT di kelurahan.

Dari beberapa pertanyaan penelitian menyangkut dengan pelaksanaan program Raskin di kedua kelurahan, terdapat 93% penerima Raskin yang menyatakan mereka mendapatkan kartu (kupon) Raskin dari kelurahan sebagai tanda penerima Raskin, sebanyak 81% penerima Raskin juga menyatakan bahwa tempat distribusi Raskin mudah dijangkau warga. Sementara terdapat 71% penerima Raskin yang mengakui bahwa petugas pelaksana distribusi Raskin mampu bekerja dan melayani mereka dengan baik, dan hanya 57% penerima Raskin yang berpendapat bahwa administrasi distribusi raskin sudah baik.

Menurut analisa peneliti pelaksanaan distribusi Raskin di kedua kelurahan sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan petunjuk Pedum Raskin. Pelaksana sudah berusaha untuk menerapkan implementasi program sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah, meskipun dalam realitanya tidak semua aturan itu dapat diseragamkan diseluruh masyarakat indonesia yang majemuk dengan latar belakang sosial ekonomi dan budaya sangat beragam. Oleh karenanya, tak jarang aturan pelaksanaan Raskin tersebut harus disesuaikan dengan dinamika kondisi masyarakat tersebut. Dalam hal ini, aparat di tingkat desa/kelurahan menjadi penentu dan ujung tombak keberhasilan implementasi Raskin dapat terlaksana dengan baik. Terkadang keputusan sistem bagi rata Raskin menjadi jalan tengah yang ditempuh oleh banyak desa/kelurahan, seperti halnya di Gunung Sarik, demi menghindari terjadinya konflik sosial dan perpecahan di masyarakat, meskipun di sisi yang lain hal tersebut menyalahi aturan yang ditetapkan oleh Pedum Raskin.

Berdasarkan distribusi jawaban penerima Raskin pada penilaian 4 indikator pelaksanaan program Raskin, diperoleh

nilai rata-rata realisasi sebesar 75,5%. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Raskin pada tahap pelaksanaan di kedua kelurahan sudah baik. Dari tinjauan tipologi pun peneliti tidak melihat perbedaan berarti pada tahap pelaksanaan di kedua kelurahan dalam cara-cara mereka mengimplementasikan program Raskin, kecuali pada penerapan sistem bagi rata jatah Raskin yang dilakukan oleh beberapa ketua RT di Kelurahan Gunung Sarik.

c.Tahap Pengawasan

Proses pengawasan pelaksanaan Program Raskin di kelurahan Purus dan Kelurahan Gunung Sarik dapat dideskripsikan dari hasil jawaban angket penelitian yang berhubungan dengan pengawasan program Raskin di kedua kelurahan tersebut.

Dari 42 total sampel, sebanyak 19% penerima Raskin yang menyatakan program Raskin sudah mendapat pengawasan dari pihak berwenang, dan terdapat 2% penerima Raskin yang menyatakan adanya masalah Raskin yang dilaporkan ke Unit Pengaduan Masyarakat (UPM), serta 12% penerima Raskin yang mengakui bahwa pengaduan masyarakat seputar masalah

pelaksanaan Raskin direspon oleh pelaksana.

Menurut analisa peneliti, fungsi pengawasan program Raskin di kelurahan Purus dan Gunung Sarik belum berjalan optimal, baik fungsi pengawasan formal yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah, maupun pengawasan informal yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti, pengawasan berkala telah dilakukan oleh pihak Bulog dan pelaksana Raskin kecamatan.

Menurut hasil penelitian Universitas Indonesia (2006), masyarakat kurang peduli terhadap permasalahan Program Raskin di wilayahnya dan sebagian bersikap apatis terhadap pengaduan karena adanya stigma buruk terhadap program pemerintah.

Penelitian LP3ES (2000) menyatakan bahwa sebagian besar responden (89%) tidak pernah mengadukan masalah pelaksanaan program. Selanjutnya penelitian Universitas Brawijaya (2006) menyatakan juga bahwa umumnya masyarakat tidak pernah mengadu kepada siapa pun tentang Program Raskin.

d. Tahap Evaluasi

Berdasarkan pengamatan peneliti, proses evaluasi Program Raskin di kelurahan Purus dan Gunung Sarik belum berjalan dengan baik. Terbukti dari temuan penelitian belum terlihat adanya perubahan cara penetapan penerima Raskin secara tepat sasaran sesuai dengan Pedum Raskin. Khususnya di kelurahan Gunung Sarik, sistem bagi rata Raskin kepada semua warga masih tetap jadi pilihan, ketimbang harus melakukan penetapan RTS baru melalui pendataan ulang dan mudes.

Kondisi tersebut juga dapat dijelaskan melalui beberapa jawaban pertanyaan yang diajukan kepada beberapa penerima Raskin sebagai sampel dalam penelitian ini.

Dari total 42 sampel, hanya 7% penerima Raskin yang menyatakan bahwa evaluasi program Raskin telah dilaksanakan, hal tersebut hanya diakui oleh penerima Raskin di kelurahan Gunung Sarik. Kemudian, adanya pembaharuan data Raskin pada setiap tahun diakui oleh 55% penerima Raskin dari kedua kelurahan. Sementara tidak ada penerima Raskin yang menyatakan adanya kasus peyalahgunaan

Raskin yang ditindak secara hukum di kedua kelurahan.

Menurut analisa peneliti, evaluasi memberikan informasi dan kontribusi tentang pelaksanaan program, baik yang bersifat kasuistik berdasarkan temuan lapangan maupun yang bersifat makro berdasarkan analisis data sekunder, sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini. Umumnya, hasil monitoring dan evaluasi (monev) telah memberikan masukan bagi perbaikan desain program, seperti dalam hal peningkatan ketepatan penetapan target melalui perubahan nama program dari OPK menjadi Program Raskin, perubahan sumber data sasaran dari BKKBN menjadi BPS, pelaksanaan mudes, dan transparansi program serta sasaran. Meskipun pada realitanya, perbaikan desain program tersebut tidak sepenuhnya dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan Program Raskin masih belum dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan distribusi jawaban penerima Raskin pada penilaian 3 indikator evaluasi program Raskin, diperoleh nilai rata-rata realisasi sebesar 20,6%. Maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program Raskin pada tahap evaluasi di

kedua kelurahan masih belum baik. Dari tinjauan tipologi, peneliti tidak melihat perbedaan berarti pada tahap evaluasi program Raskin di kedua kelurahan dalam cara-cara mereka mengimplementasikan program Raskin.

3.3 Manfaat Raskin yang diterima RTS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penerima Raskin mengakui bahwa Program Raskin sangat bermanfaat dan membantu meringankan beban pengeluaran mereka dalam memenuhi kebutuhan beras keluarga pada setiap bulan.

Dari 42 total sampel, 39% penerima Raskin mengakui kebutuhan beras mereka sebulan terbantu dengan adanya jatah Raskin. Kemudian, terdapat 12 % penerima Raskin yang menyatakan jatah Raskin telah mencukupi kebutuhan keluarga mereka dalam sebulan. Sementara 90% penerima Raskin mengharapkan agar Program Raskin terus berlanjut.

3.4 Efektifitas Program Raskin

Konsep efektifitas diperlukan sebuah organisasi untuk dapat mengukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi

tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektifitas sendiri memiliki berbagai perspektif yang beragam, sesuai kerangka acuan yang digunakan oleh masing-masing organisasi.

Maka efektifitas pelaksanaan distribusi Raskin di Kota Padang pada periode tahun 2011 pada penelitian ini, bertujuan mendeskripsikan tingkat kesesuaian antara realisasi pelaksanaan program Raskin dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dengan menggunakan indikator penilaian “6 Tepat” yaitu : tepat sasaran, tepat harga, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas dan tepat administrasi berdasarkan Pedoman Umum Raskin 2011

Dari total 42 sampel, sebanyak 17% penerima Raskin menyatakan bahwa data penerima Raskin di kelurahan mereka sudah tepat sasaran. Alasan mereka memberi penilaian demikian, karena menurut penilaian mereka semua RTM yang ada dilingkungan mereka sudah terdaftar sebagai penerima Raskin. Terdapat 74 % penerima Raskin yang berpendapat bahwa jumlah Raskin yang disalurkan sudah cukup jumlah sebanyak 15 Kg per RTS. Sedangkan harga jual Raskin seharga Rp.1.600/Kg dianggap

sudah tepat oleh semua (100%) penerima. Adapun kualitas Raskin yang sudah standar dan layak konsumsi diakui oleh 71% penerima, namun hanya 14% penerima saja yang menyatakan distribusi Raskin dilakukan dengan tepat waktu, yakni setiap bulan. Sementara ada 57% penerima yang menyatakan bahwa administrasi Raskin sudah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana di kelurahan mereka. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bahwa persentase rata-rata tingkat efektifitas program Raskin di kedua kelurahan hanya sebesar 55,5 % dari enam indikator penilaian diatas.

3.5 Masalah Pendataan Program Raskin

Dalam konteks penelitian ini, penulis ingin memberi gambaran tentang permasalahan pendataan RTS Program Raskin yang sering menjadi isu sentral yang tak pernah sepi dibicarakan dalam implementasi Raskin dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan menyangkut dengan permasalahan pendataan RTS Program Raskin ini, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa permasalahan

pendataan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu :

a. Kesalahan saat pendataan yang disebabkan oleh beberapa faktor , yaitu :

1. Indikator dan variabel untuk mengukur kemiskinan belum mampu menggambarkan profil kemiskinan RTM secara lebih detil.
2. Kesalahan dan keterbatasan sumberdaya manusia pencacah
3. Ada beberapa variabel penilaian yang terlewat saat mendata RTM
4. Keterbatasan jumlah tenaga pencacah, sehingga tidak semua RTM terdata
5. Pengambilan data RTS hanya berpedoman pada data ketua RT saja
6. Kesalahan administrasi saat data RTM hasil pendataan BPS lalu diserahkan pada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang kemudian TNP2K yang menetapkan RTS Penerima Raskin.
7. Keterbatasan waktu pencacahan, sehingga terkesan dilakukan terburu-buru.

8. Kurang informatifnya sosialisasi pencacahan, sehingga masyarakat banyak tidak tahu.

9. Kurangnya kerjasama aktif pencacah dengan perangkat desa/kelurahan saat pencacahan

10. Tidak dilakukannya verifikasi dan pembaruan data BPS melalui mudes oleh pihak kelurahan.

b. Kesalahan sasaran pada saat distribusi Raskin yang disebabkan oleh :

1. Distribusi Raskin tidak berdasarkan daftar penerima yang telah ditetapkan

2. Adanya manipulasi data oleh pelaksana

3. Adanya sistem bagi rata untuk menghindari konflik sosial

4. Konsep RTS penerima Raskin tidak ditetapkan secara tegas dan jelas.

5. Cukup tingginya keinginan warga non miskin untuk mendapatkan Raskin.

6. Raskin dijual bebas bagi siapa yang menginginkannya untuk mencapai target waktu penjualan beras dan pembayarannya ke Bulog.

3.6 Indikator Ketepatan Sasaran

Penerima Raskin

Pada penelitian ini peneliti ingin membuktikan keakuratan data PPLS 2008 dengan cara membandingkan hasil penelitian dari sebaran kuesioner diperoleh jawaban penerima Raskin mengenai kriteria ketepatan sasaran penerima Raskin dengan menggunakan 14 indikator BPS sebagai acuan.

Ketepatan pendataan sasaran penerima Raskin diukur dengan 14 indikator kemiskinan BPS secara rata-rata dinilai sudah tepat (57,2%) oleh penerima Raskin. Dinilai tidak tepat pada indikator penggunaan sumber penerangan (10%), memasak dengan kayu bakar (14%) dan pendapatan dibawah Rp.600.000 sebulan (21%). Namun dinilai sangat tepat pada indikator lantai rumah dari kayu/semen (88%), makan minimal 2 kali sehari (93%), dirumah tersedia WC (79%) dan sekolah taman SD (98%).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang implementasi Program Raskin di Kota Padang, dengan

studi kasus di Kelurahan Purus dan Gunung Sarik, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi program Raskin secara rata-rata dinilai penerima Raskin masih belum baik, lemah pada tahap perencanaan (7%), sudah baik pada tahap pelaksanaan (75,5%), kurang pada tahap pengawasan (11%) dan tahap evaluasi program (20,6%). Secara tipologi, tidak terdapat perbedaan menyolok dengan cara-cara implementor program Raskin di kelurahan Purus dan Gunung Sarik dalam mengimplementasikan program Raskin di tempat mereka, kondisi ini disebabkan adanya keseragaman aturan yang diterapkan dalam program Raskin.
2. Program Raskin dirasakan bermanfaat oleh 93% penerima Raskin karena dapat meringankan beban pengeluaran mereka dalam memenuhi kebutuhan beras keluarga. Mayoritas (90%) penerima Raskin menghendaki program Raskin terus berlanjut.
3. Efektifitas program Raskin diukur dengan indikator 6 Tepat secara rata-

rata dinilai sudah tepat (55,5%) oleh penerima Raskin. Dinilai tidak tepat pada indikator tepat sasaran (17%) dan tepat waktu (14%). Namun dinilai sudah tepat pada indikator tepat jumlah (74%), tepat harga (100%), tepat kualitas (71%) dan tepat administrasi (57%).

4. Permasalahan pendataan RTS Program Raskin disebabkan oleh kesalahan saat proses pendataan oleh BPS dan kesalahan sasaran pada saat distribusi Raskin oleh pelaksana. Ketepatan sasaran Penerima Raskin diukur dengan 14 indikator kemiskinan BPS secara rata-rata dinilai sudah tepat (57,2%) oleh penerima Raskin.
5. Kendala dan kelemahan Program Raskin yang dirasakan saat ini terletak pada minimnya sosialisasi, sistem pendataan RTM yang belum tepat sasaran, kurangnya pagu anggaran dan pengawasan program, serta masih minimnya disposisi implementor untuk melaksanakan Program Raskin berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Saran-Saran

1. Sistem pendataan dan penetapan RTS merupakan faktor penentu (*critical factor*) dalam keberhasilan implementasi Program Raskin, banyak rentetan masalah yang terjadi diawali oleh tidak tepatnya sasaran penerima Raskin. Oleh karena itu harus ada kesungguhan, ketegasan dan batasan yang jelas dari implementor tentang kriteria RTM yang layak menerima Raskin.
2. Pemutakhiran atau pembaruan (*update*) data PPLS 2008 penerima Raskin mestinya dapat dilakukan implementor melalui Mudes (musyawarah desa) sesuai dengan kebutuhan didasari kesepakatan bersama warga berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
3. Sistem pengawasan dan koordinasi program Raskin mestinya tidak hanya dilakukan secara formal oleh pemerintah, tetapi juga memberi otoritas pada pengawasan lokal ditingkat desa/kelurahan secara informal, sehingga dapat memantau dan mengawal pelaksanaan program dengan semestinya.

4. Pemerintah harus mengambil kebijakan untuk menambah jumlah pagu Raskin yang lebih memadai, atau bahkan membagikan Raskin gratis kepada 17,5 juta RTM, agar persoalan keterbatasan jumlah dapat teratasi, namun mutlak dilaksanakan secara tepat sasaran, karena pengalaman selama ini meskipun jumlah anggaran ditingkatkan, justru semakin meningkatkan jumlah RTM yang menjadi penerima raskin setiap tahunnya. Tentu saja kondisi ini kontradiksi dengan upaya pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono, 2006, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Praktek*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali, Farid.1997. *Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu Administrasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian*. Rineka Cipta.Jakarta.
- Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial, 2006, *Penduduk Fakir Miskin Indonesia*, BPS, Jakarta Indonesia
- Biro Pusat Statistik Indonesia. 2006. *Statistik Indonesia 2006*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. Padang Barat dalam Angka 2010. BPS Kota Padang.
- Badan Pusat Statistik. Kuranji dalam Angka 2010. BPS Kota Padang.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif : Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. UMM Press, Malang.
- Hardjito.D .2001.*Teori Organisasi dan Teknik Pengorganisasian*. Rajawali.Jakarta
- Hastuti ,2008. *The Effetiveness of Raskin Program. Research Report, February 2008*. Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- Hastuti, Maxwell J.2003.*Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN): Apakah Program Tahun 2002 Berjalan Efektif ? Bukti-bukti dari Bengkulu dan Karawang*. Laporan Lapangan, Juni 2003. Lembaga Penelitian SMERU.Jakarta
- Husein Umar, 1998. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, PT. Gramedia. Jakarta
- Islamy, M. Irfan, 1997. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- Jauhariansah, A. 2009, *Studi Implementasi Penanggulangan Kemiskinan Dalam Rangka Program Beras Keluarga Miskin (Raskin)*. Pustaka Undip.Semarang
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2011. *Pedoman Umum Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin)*. Jakarta
- LP3ES, 2000. *Studi Evaluasi JPS-OPK Beras di Daerah Pedesaan Tahun Anggaran 1999/2000*. LP3ES. Jakarta.

- Masjkuri, Siti U, 2012. Perbaikan Kampung Komprehensif Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Sosial Serta Kemandirian Masyarakat Miskin Kampung Kumuh. (Studi Empirik Di Kota Surabaya). Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga.Surabaya.
- Moeljarto, Tjokrowinoto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*.Pustaka Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyanto Sumardi & Hans Dieter Evers. 1985. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok* Edisi Revisi. CV Rajawali Citra Press. Jakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Nurdin, Fadhil. 1990. *Pengantar Studi Kesejahteraan Sosial*. PT. Angkasa Bandung.
- Parulian Hutagaol, Asmara A, 2008. Analisis Efektivitas Kebijakan Publik Dalam Memihak Masyarakat Miskin dalam studi kasus Pelaksanaan Program RASKIN di Provinsi Jawa Barat. Lembaga Penelitian IPB. Bogor.
- Singarimbun, Masri. 1982. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta.
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Refika Aditama. Bandung
- SMERU, 2008. *Efektifitas Pelaksanaan Raskin*. Jakarta
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Adminstrasi*. CV. Alvabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Rafika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soejono. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suyanto, Bagong & Sutinah (ed.), 2005. *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prenada Media, Jakarta.
- Tabor, Steven R. dan M. Husein Sawit, 2006. Program Bantuan Natura Raskin dan OPK: Penilaian Makro Pusat Penelitian dan Pengembangan Perum Bulog. Jakarta
- Universitas Brawijaya, 2006. Studi Pelaksanaan Program Raskin Propinsi Jatim 2006. Malang. Universitas Brawijaya
- Universitas Indonesia, 2006. Studi Penajaman Sasaran Penerima Manfaat Program Beras Miskin (Raskin) 2004. FE UI.Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002. *Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- Winarni, E. Dwi. 2006. Pentingnya Data dalam Penggulangan Kemiskinan. Jurnal PEKSOS, Volume 5. STKS, Bandung.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo.Yogyakarta.
- World Bank, 2006. *Making the New Indonesia Work for the Poor*. World Bank. Jakarta.
- Yashin, Sulcahn. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI-Besar) serta Ejaan Yang Disempurnakan Dan Kosa Kata Baru*. Amanah. Surabaya.

Situs internet :

_____ Penyaluran Raskin tidak tepat sasaran, (tersedia di : <http://www.padang-today.com/?mod=berita&today=detil&id=33761>). Tanggal 6 Maret 2012)

_____ Anggota DPR : Banyak Ketidaksesuaian harga tebus Raskin, (tersedia di: <http://beritadaerah.com/news/getContent/60280>. Akses tanggal 9 April 2012).

_____ 37.837 KK Miskin Tak terima Jatah Raskin, (tersedia di: <http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/12/19/1046>, Akses tanggal 27 Pebruari 2012)

_____ Pemko Padang Beri Beras Raskin Otonom 2.200 KK (tersedia di: <http://www.sumbaronline.com/berita-3230->

[pemko-padang-beri-raskin.htm](http://www.pemko-padang-beri-raskin.htm). Akses tanggal 3 Maret 2012)

_____ Alur Distribusi Program Raskin. (tersedia di: <http://www.bulog.co.id/alurraskinv2.php>, Akses tanggal 3 Maret 2012)

<http://www.padang.go.id>. diakses tanggal 22 Maret 2012

<http://www.depsos.go.id>, diakses tanggal 24 Maret 2012

<http://www.bulog.go.id>, diakses tanggal 24 Maret 2012

<http://www.bps.go.id>, diakses tanggal 25 Maret 2012

<http://www.bkkbn-jatim.go.id>, diakses tanggal 27 Maret 2012